

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kriminalitas merupakan salah satu masalah besar yang terjadi diberbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang, permasalahan ini selalu dihadapi dan sulit untuk dihindari. Amerika Selatan, Irak, dan Kolumbia merupakan negara yang menempati tiga besar dunia sebagai negara dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Sedangkan indonesia, merupakan negara berkembang yang menempati posisi sebagai negara dengan tingkat kriminalitas yang sedang di dunia. Kriminalitas dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kriminalitas merupakan permasalahan yang sulit dihindari di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang (Rahmalia et al., 2019).

Kriminalitas adalah sebuah bentuk perbuatan sosial yang melanggar norma hukum yang berkaitan dengan merampas hak milik orang lain, mengganggu ketertiban masyarakat dan pembunuhan satu maupun sekelompok orang. Tindak kriminalitas terjadi karena adanya kepincangan sosial, kebencian, tekanan mental, ataupun perubahan lingkungan yang terjadi di masyarakat (I. F. Astuti et al., 2018). Pada zaman sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar untuk melakukan tindak kriminal (Edwart & Azhar, 2019) Kriminalitas adalah tindakan yang bersifat negatif dan melanggar norma sosial serta norma hukum. Faktor yang mendorong tindak kriminal di

Indonesia adalah masalah perekonomian yaitu meliputi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Menurut Hilman et al., (2015) kriminalitas berdampak luas kepada seluruh lapisan masyarakat, permasalahan yang pelik ini dapat terjadi di manapun dan kapanpun, tindak kejahatan yang dilakukan banyak terjadi diberbagai tempat dan waktu yang berbeda. Sehingga dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan pada dimensi baru akhirakhir ini menunjukan bahwa kriminalitas selalu mengalami perkembangan (Sumari et al., 2020).

Era globalisasi ini telah mendorong tumbuhnya kebudayaan serta pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan teknologi dan kebudayaan menimbulkan persaingan dalam kehidupan manusia diantaranya ideologi, sosial, ekonomi dan etika. Banyak perubahan yang terjadi pada perilaku manusia seperti, memandang kesenangan hanya dari materi, bermewah-mewahan dan lain sebagainya. Hal ini juga memberikan pengaruh berubahnya nilai yang berlaku pada masyarakat, perubahan positif tentu saja sangat menguntungkan masyarakat disekitar namun perubahan negatif dapat menimbulkan gangguan ditengah masyarakat, dampak dari perubahan negatif seperti melakukan tindakan kriminalitas (Putra et al., 2020).

Adanya keinginan pemenuhan kebutuhan yang melimpah dari individu, bila tidak diiringi dengan kemampuan dan skill yang memadai akan menyebabkan seseorang tersebut kesulitan untuk memenuhi kebutuhan materi yang diinginkan sehingga memaksa seseorang untuk melakukan

dengan cara yang instan dengan melakukan tindakan kejahatan merupakan salah satu upaya penolong (Dermawanti et al., 2015). Kriminalitas sangat rawan terjadi di wilayah perkotaan daripada pedesaan, hal ini terjadi akibat beberapa faktor yang mana salah satunya yaitu ketatnya persaingan di wilayah perkotaan daripada di pedesaan (Septaria & Zulfaridatulyaqin, 2021). Wilayah perkotaan umumnya ramai oleh perantau dimana mereka sedang mencari pekerjaan.

Kajian tentang faktor-faktor pendorong kriminalitas telah banyak dilakukan, menghasilkan temuan yang bervariasi. Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dari faktor-faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran terhadap tingkat kriminalitas. Namun, ada juga studi yang menemukan pengaruh negatif atau bahkan hubungan yang tidak signifikan, yang seringkali disebabkan oleh konteks sosial dan ekonomi yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu secara konsisten menemukan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kriminalitas Adri, M., Silitonga, F.K., & Siregar, (2019).

Hal ini sejalan dengan Teori Pilihan Rasional yang dikemukakan Adam Smith pada tahun (1776), di mana individu yang kehilangan pekerjaan atau terperangkap dalam kemiskinan melihat kejahatan sebagai satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup namun dalam konteks kriminologi, teori ini lebih diformalkan oleh Cesare Beccaria (1764) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Gary S. Becker (1968) melalui artikelnya *"Crime and Punishment: An Economic Approach"*

Fenomena ini terlihat jelas di kota-kota besar Indonesia, termasuk Medan, di mana tingginya urbanisasi tanpa diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja yang memadai sering kali memicu peningkatan angka kriminalitas, terutama pencurian dan perampokan. Banyak pendatang yang datang ke kota dengan harapan mencari kehidupan yang lebih baik, namun kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga terpaksa beralih ke jalur ilegal.

Penelitian oleh Wijayanti (2018) menemukan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Astuti et al. (2018) juga menyimpulkan bahwa kemiskinan memiliki peran krusial dalam mendorong tindak kriminalitas.

Di sisi lain, beberapa studi justru menemukan hasil yang berlawanan, yaitu pengaruh negatif atau bahkan tidak signifikan. Hal ini seringkali terjadi dalam konteks di mana faktor-faktor lain, seperti tingkat pendidikan, efektivitas penegakan hukum, atau dukungan sosial, lebih dominan dalam mencegah kriminalitas.

Pengaruh negatif ini dapat terjadi ketika peningkatan pendapatan atau kesempatan kerja di suatu wilayah justru diikuti oleh peningkatan kriminalitas. Ini bisa jadi karena meningkatnya target kejahatan (misalnya, barang berharga yang lebih banyak) atau munculnya jenis kejahatan baru, seperti penipuan daring, yang tidak secara langsung terkait dengan kemiskinan dan pengangguran. Contohnya, di beberapa daerah di Indonesia, meskipun angka kemiskinan menurun, kejahatan cybercrime justru

meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan literasi digital yang belum diimbangi dengan kesadaran akan keamanan siber.

Fenomena ini dapat terjadi ketika peningkatan pendapatan atau kesempatan kerja di suatu wilayah justru diikuti oleh peningkatan kriminalitas. Ini bisa jadi karena meningkatnya target kejahatan (misalnya, barang berharga yang lebih banyak) atau munculnya jenis kejahatan baru, seperti penipuan daring, yang tidak secara langsung terkait dengan kemiskinan dan pengangguran. Seperti di beberapa daerah di Indonesia, meskipun angka kemiskinan menurun, kejahatan cybercrime justru meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan literasi digital yang belum diimbangi dengan kesadaran akan keamanan siber.

Beberapa studi menemukan bahwa ketika tingkat kemiskinan menurun, kriminalitas juga menurun, namun penurunannya tidak selalu linier. Bahkan ada studi seperti Fajnzylber, Lederman, & Loayza (2002) yang menunjukkan bahwa hubungan antara kemiskinan dan kriminalitas bisa kompleks dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketimpangan pendapatan.

Di Indonesia, kejadian kriminalitas sedang marak terjadi, berita mengenai kriminalitas dapat ditemukan dengan mudah diberbagai media (Kosmaryati et al., 2019). Hingga saat ini sudah tidak terhitung berapa jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia. Semakin maju perkembangan zaman semakin berpacu seseorang untuk mengikuti segala model kehidupan, dimana mereka menghalalkan segala cara guna mendapat apa yang diinginkan walaupun dengan cara yang tidak baik. Perbuatan tersebut banyak dasarnya

baik pada diri sendiri maupun atas dorongan dari orang lain. Sudah tak asing lagi, kejahatan yang terjadi kebanyakan berlatar belakang dari kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat itu sendiri (Rahmi & Adry, 2018).

Kriminalitas dapat terjadi baik pada perkotaan maupun pedesaan di Indonesia kriminalitas hampir terjadi diseluruh wilayah, kata kriminalitas bersumber dari kata “Crime” yang berartikan kejahatan atau tindakan kriminal. Kriminalitas dapat menyebabkan kerugian baik secara psikologis dan ekonomi (Zahra & Usman, 2023). Terjadinya tindakan kriminalitas dipengaruhi oleh berbagai macam permasalahan perekonomian seperti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan pendapatan yang rendah sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminalitas karena hasil yang diperoleh dari tindakan kriminalitas lebih menguntungkan (Rahmalia et al., 2019).

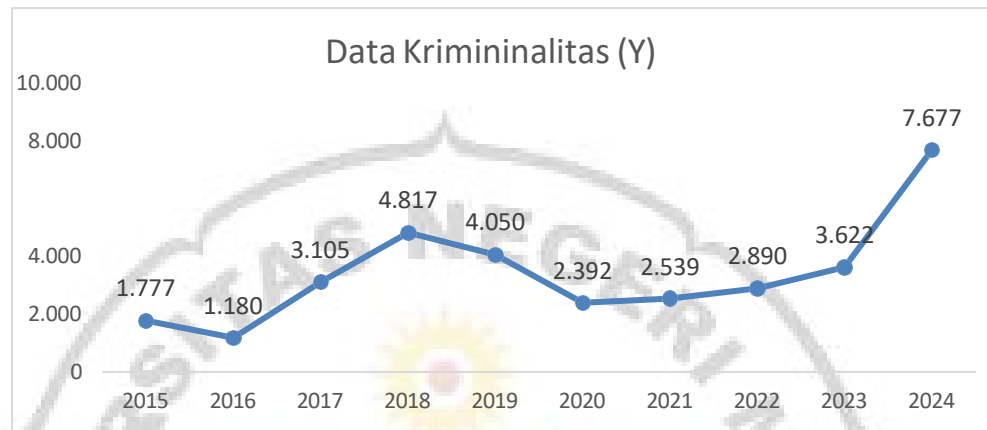
Kriminalitas dapat terjadi ketika kondisi ekonomi seorang individu mengalami keterpurukan. Dewasa ini, persaingan di dunia kerja semakin ketat. Hal ini didorong oleh perkembangan globalisasi dimana globalisasi menuntut setiap individu untuk memiliki skill atau keahlian yang berkualitas agar mampu bersaing di dunia kerja. Perkembangan globalisasi ini dapat dihadapi dengan perubahan dan pembaharuan ke arah yang lebih baik (Adri et al., 2019). Keinginan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika tidak diiringi dengan kemampuan yang baik maka akan berujung pada tindak kejahatan atau kriminalitas.

Kriminalitas dapat menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Kriminalitas akan memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan salah satunya aspek ekonomi, baik secara makro maupun mikro. Tingkat kriminalitas yang tinggi dapat menurunkan kepercayaan investor dimana investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan devisa negara serta penyerapan tenaga kerja.

Kriminalitas juga dapat menghambat produktivitas masyarakat akibat rasa takut yang ditimbulkan. Hal tersebut karena rasa aman yang tercipta turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terpenuhinya rasa aman dalam masyarakat akan memberikan keadaan yang kondusif untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi.

Berdasarkan data yang diungkapkan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, ada dua jenis kejahatan yang marak terjadi di wilayah Polrestabes Medan selama Januari hingga Juni 2023. Yaitu pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 128 kasus, dan pencurian pemberatan (curat) sejumlah 562 kasus. Angka ini jadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan kasus kriminalitas di Polrestabes lainnya di Sumut. Meski salah satu alasannya adalah cakupan wilayah hukum Polrestabes Medan yang luas. Sementara itu, untuk seluruh wilayah Sumut, tercatat ada 2.436 kasus curat dan 324 kasus curas di semester pertama 2023. Setelah dicek, di angka ini jadi yang tertinggi di Indonesia (kumparanNEWS, 2023)

Gambar 1. 1 Jumlah Kriminalitas di Kota Medan Tahun 2015-2024



Sumber: (Polrestabes Medan, 2025)

Berdasarkan data resmi yang diperoleh dari Polrestabes kota Medan dapat dilihat pada gambar 1.1 yang dimana jumlah data kasus kriminalitas di kota meda mengalami fluktuasi, yang dimana pada grafik dijelaskan bahwa pada tahun 2016 merupakan tahun yang memiliki kasus kriminalitas terendah dari tahun 2015-2024, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor perekonomian nasional mulai membaik setelah perlambatan 2015, tingkat inflasi terkendali. Pemerintah gencar melakukan program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur, yang sedikit banyak meningkatkan lapangan kerja.

Berdasarkan data resmi yang diperoleh dari Polrestabes kota Medan tercatat ada beberapa jenis tindak kejahatan kriminal yang marak terjadi di wilayah Kota Medan selama setahun terakhir di tahun 2023. Diantaranya kasus pencurian sebanyak 193 kasus (JTP) dan 165 kasus (JPTP), pencopetan sebanyak 33 kasus (JTP) dan 29 kasus (JPTP), penjambratan sebanyak 189 kasus (JTP) dan 57 kasus (JPTP), penipuan 746 (JTP) dan 364 (JPTP) dan pembegalan 144 (JTP) dan 41 kasus (JPTP).

aFenomena meningkatnya tindak kriminal di Kota Medan dapat dilihat dari laporan Kepolisian yang menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana yang ditangani oleh Polrestabes Medan pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2022 tercatat sekitar 9.574 kasus, naik dari tahun 2021 yang berada pada angka sekitar 8.750 kasus. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Medan masih menjadi wilayah yang rentan terhadap kejahatan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, hingga kejahatan jalanan. Peningkatan kriminalitas juga berlanjut pada tahun berikutnya, dimana pada tahun 2023 tercatat sebanyak 9.289 kasus tindak pidana ditangani oleh Polrestabes Medan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kriminalitas di Medan bukan sekadar kejadian sementara, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Selain itu, data Statistik Kriminal Indonesia juga menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan jumlah kejahatan yang cukup tinggi dalam periode 2022 hingga 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kota Medan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan kependudukan terbesar di Sumatera Utara memiliki kontribusi yang besar terhadap tingginya jumlah kasus kriminalitas di wilayah tersebut. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa Kota Medan memiliki tantangan besar dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama pada masa pasca pandemi yang ditandai oleh tekanan ekonomi dan meningkatnya ketimpangan sosial.

Tingginya angka kriminalitas di Kota Medan pada periode 2022–2024 juga tidak terlepas dari persoalan sosial ekonomi masyarakat. Secara teori,

kriminalitas sering muncul akibat adanya tekanan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan. Masyarakat yang mengalami keterbatasan akses pekerjaan dan pendapatan cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk “jalan pintas” memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks Kota Medan, kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil serta meningkatnya biaya hidup dapat memicu munculnya tindak kriminalitas terutama pada kelompok usia produktif. Selain itu, mobilitas penduduk yang tinggi dan karakter kota besar yang heterogen juga dapat menciptakan peluang terjadinya kejahatan lebih besar dibandingkan daerah lain.

Kondisi sosial relatif stabil, sehingga kriminalitas turun. Sedangkan pada tahun 2024 merupakan tahun yang dimana kasus kriminalitas sangat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya tercatat ada 7.677 kasus kriminalitas di kota Medan ada beberapa faktor penyebabnya. Lonjakan pengangguran dan kemiskinan di beberapa tahun sebelumnya menyebabkan tekanan sosial ekonomi yang mendorong tindak kriminal. Fenomena urbanisasi di Medan juga berkontribusi meningkatnya jumlah penduduk dengan lapangan kerja yang terbatas. Faktor disparitas pendapatan jarak kaya-miskin makin besar sehingga meningkatkan potensi kriminalitas.

Fenomena ini sesuai dengan kondisi di kota-kota besar Indonesia, termasuk Medan, yang menghadapi problem kemiskinan perkotaan, pengangguran terbuka, serta ketidakmerataan pendapatan. Pengangguran merupakan salah faktor utama yang dimana peluang kerja yang sempit

mendorong sebagian orang melakukan tindakan kriminal sebagai alternatif bertahan hidup kemudian kemiskinan, keterbatasan ekonomi menciptakan tekanan sosial selanjutnya disparitas pendapatan, ketidakadilan sosial memicu kecemburuan sosial dan tindak kriminal.

Salah satu faktor yang mendorong kriminalitas yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang tidak memiliki pekerjaan sehingga orang itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, peluang seseorang mendapatkan penghasilan itu kecil sehingga terdorong untuk melakukan tindak kriminal. Ditengah perkembangan globalisasi yang dipenuhi dengan gaya hidup materialistis maka terdapat kemungkinan untuk seseorang melakukan tindakan ilegal sebagai alternatif pemuas kebutuhan (Rahmalia et al., 2019).

Fenomena ini sejalan dengan teori Strain Theory (Teori Ketegangan) dari Robert K. Merton (1938) yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat ada tujuan-tujuan budaya (misalnya kekayaan, status, kesejahteraan), tetapi tidak semua orang punya akses ke sarana yang sah (pendidikan, pekerjaan). Ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan dengan cara yang sah, mereka bisa terdorong menggunakan cara-cara ilegal, termasuk kriminalitas (Merton, 1938).

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan kota, tidak terkecuali di Kota Medan yang dikenal sebagai salah satu pusat urban terbesar di Sumatera Utara. Tingginya angka kejahatan, mulai dari tindak pencurian dengan

kekerasan, prostitusi anak yang terorganisir, hingga konsentrasi kriminalitas di wilayah tertentu, menunjukkan bahwa kriminalitas di Medan tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi yang pengangguran memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kriminalitas di berbagai daerah, termasuk di Kota Medan sebagai salah satu pusat urban terbesar di Sumatera Utara. Tingginya jumlah pencari kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini semakin diperparah oleh gaya hidup konsumtif yang berkembang di tengah arus globalisasi. Ketika penghasilan tidak dapat diperoleh melalui jalur yang sah, sebagian individu terdorong untuk mencari jalan alternatif, termasuk melakukan tindak kriminal seperti pencurian, peredaran narkoba, hingga aksi begal. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert K. Merton melalui Strain Theory (1938), bahwa ketidakmampuan individu mengakses sarana sah untuk mencapai tujuan hidup dapat mendorong mereka beralih pada cara-cara ilegal. Di Medan, fenomena ini tampak dari maraknya kasus kriminalitas yang dilaporkan aparat penegak hukum. Berbagai penelitian dan laporan lokal menunjukkan bahwa pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya kualitas pendidikan menjadi faktor dominan yang memicu tingginya angka kejahatan. Wakil Ketua DPRD Medan bahkan menegaskan bahwa pengangguran yang tidak tertangani telah membuat masyarakat, terutama pemuda, melampiaskan

ekspresinya ke arah negatif. Dengan kata lain, pengangguran bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga memunculkan dampak sosial berupa meningkatnya kriminalitas yang mengganggu stabilitas kota. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran harus dipandang secara serius, bukan hanya dari sisi penyediaan lapangan kerja, melainkan juga dari sisi pencegahan kriminalitas yang lebih luas.

Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya. Anata, (2020) menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kriminalitas di Jawa Tengah. A.W. Astuti et al., (2025) menunjukkan bahwa kemiskinan berkontribusi terhadap peningkatan tindak kriminal di Kota Medan. Sementara itu, Arief & Wibowo (2021) menyatakan bahwa disparitas pendapatan memperburuk ketimpangan sosial dan mendorong meningkatnya kriminalitas di perkotaan Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengangguran, kemiskinan, dan disparitas pendapatan merupakan faktor penting yang menjelaskan dinamika kriminalitas di Kota Medan.

Fenomena ini mendorong berkembangnya kajian kriminologi yang lebih kontekstual dan adaptif. Misalnya, pemetaan zona rawan kriminalitas memperkuat perlunya pendekatan kriminologi geospasial (Aprillya, 2021), sementara maraknya keterlibatan anak dalam tindak pidana mengarahkan pada pengembangan kriminologi anak (Flora, 2023).

Di sisi lain, fenomena prostitusi anak sebagai bentuk *organized crime* menuntut integrasi teori psikologi kriminal dan kelemahan regulasi hukum

dalam kajian kriminologi (Lubis, 2021). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa faktor kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatnya angka kriminalitas, sehingga membuka ruang bagi pendekatan ekonomi dalam memahami kejahatan di Medan (Putri & Azansyah, 2023).

Persepsi masyarakat yang kerap menggambarkan Medan sebagai “kota keras” juga memperlihatkan bahwa kriminalitas telah menjadi bagian dari dinamika sosial-budaya yang berpengaruh pada pola hubungan masyarakat (Reddit, 2021). Kondisi ini menegaskan bahwa perkembangan kriminologi di Medan tidak bisa dilepaskan dari realitas kriminalitas yang terjadi, sehingga diperlukan studi yang lebih mendalam untuk memahami penyebab, pola, dan dampak kriminalitas serta mencari solusi yang tepat guna menekan angka kejahatan di wilayah ini.

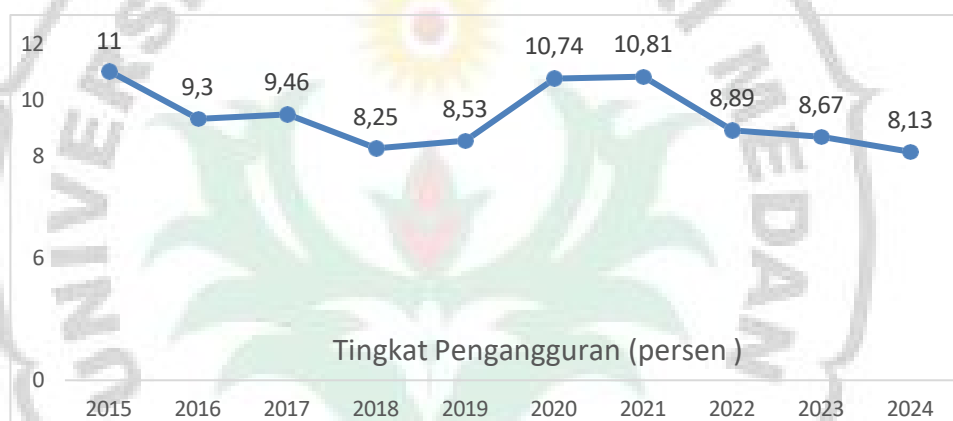
Fenomena kriminalitas di Kota Medan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat, salah satunya adalah tingkat pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan masih relatif tinggi dibandingkan kota-kota lain di provinsi tersebut. Tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja formal maupun informal mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif penghasilan instan melalui jalur ilegal. Hal ini sejalan dengan teori *economic motivation* dalam kriminologi, yang menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya ekonomi dapat mendorong individu melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan hidup.

Di Medan, kasus kriminalitas jalanan seperti pencurian kendaraan bermotor, pencopetan, dan begal kerap kali dilakukan oleh kelompok masyarakat usia produktif yang seharusnya terserap di pasar kerja. Kondisi ini diperkuat dengan adanya laporan bahwa mayoritas pelaku begal yang tertangkap merupakan pemuda yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga mereka menjadikan tindakan kriminal sebagai sumber penghasilan (Posmetro Medan, 2025). Selain itu, penelitian Putri & Azansyah (2023) juga menemukan bahwa kemiskinan dan pengangguran berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya angka kriminalitas di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kriminalitas di Medan tidak semata-mata lahir dari faktor budaya atau lemahnya penegakan hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan faktor struktural seperti pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, upaya penanggulangan kriminalitas di Kota Medan tidak hanya membutuhkan strategi penegakan hukum yang tegas, tetapi juga kebijakan yang mampu menurunkan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Pengangguran disuatu wilayah atau negara memperlihatkan bagaimana keadaan pembangunan dari wilayah tersebut, semakin tinggi tingkat pengangguran disuatu wilayah maka semakin buruk pembangunan ekonomi diwilayah tersebut. Pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan atau sedang berada pada masa mencari pekerjaan adalah permasalahan yang harus ditangani, karena pengangguran merupakan penyebab dari bermacam-macam

masalah sosial dan dapat menyebabkan dampak yang luas, dampak dari pengangguran dapat menjadikan seseorang sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan berakhir melakukan tindakan kriminalitas (Kasim & Hendra, 2023).

Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran di Beberapa Kota Tahun 2014-2023



Sumber: (BPS Sumut, 2025)

Gambar diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 hingga tahun 2023 memang cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 Kota Medan mampu menekan angka pengangguran menjadi 8.13% hal ini terjadi karena penurunan angka pengangguran tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Medan dalam merangsang penciptaan lapangan pekerjaan. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai kebijakan aktif yang dilakukan Pemerintah Kota Medan, seperti pelatihan berbasis kompetensi, program magang, serta sinergi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuka peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat. Secara keseluruhan, penurunan ini mencerminkan

upaya konkret dalam pemulihan pasca-pandemi dan penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan lapangan kerja.

Sebaliknya, pada tahun 2024 tingkat pengangguran turun menjadi 8,13 persen. Penurunan ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, seperti program pemulihan ekonomi nasional (PEN), dukungan UMKM, serta peningkatan investasi di sektor jasa dan perdagangan yang cukup dominan di Kota Medan. Meskipun persentase pengangguran menurun, fenomena kriminalitas justru meningkat tajam di tahun yang sama (7.677 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa turunnya angka pengangguran tidak otomatis diikuti oleh penurunan kriminalitas, sebab faktor lain seperti disparitas pendapatan, kemiskinan perkotaan, dan ketimpangan sosial juga sangat berperan dalam memicu tindak kriminal.

Namun jika dilihat jumlah penduduk miskin di Kota Medan terus meningkat hingga pada tahun 2024 dengan jumlah 695.29 jiwa hal ini setara dengan 7.94% hal ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pembangunan Ekonomi dan Sosial di Kota ini. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain tingginya tingkat pengangguran terbuka, rendahnya daya serap tenaga kerja formal, serta dominannya sektor informal dengan produktivitas yang rendah. Selain itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kota Medan turut memperburuk kondisi, di mana kawasan pinggiran seperti Medan Utara, Marelan, Belawan, dan Medan Labuhan masih tertinggal dari segi akses

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi dibandingkan pusat kota (Pratiwi etall., 2023).

Kondisi ini dapat dianalisis menggunakan Teori Strain (Merton, 1938), yang menyatakan bahwa meskipun sebagian masyarakat telah memperoleh pekerjaan, ketidakmampuan untuk mencapai standar kesejahteraan yang diharapkan tetap dapat menimbulkan tekanan (strain) dan mendorong individu ke arah tindakan menyimpang. Selain itu, Teori Differential Opportunity (Cloward & Ohlin, 1960) juga relevan, di mana kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal lebih terbuka pada lingkungan dengan ketimpangan sosial tinggi meski tingkat pengangguran menurun.

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu. Anata (2013) menunjukkan bahwa di Pulau Jawa, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas. Zakaria (2023) menemukan bahwa pengangguran memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kriminalitas di Jawa Timur. Di sisi lain, Mubarok & Saepudin (2021) menyatakan bahwa meskipun pengangguran tidak selalu signifikan, kemiskinan justru lebih dominan memengaruhi kriminalitas di kota-kota besar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tren pengangguran di Kota Medan 2015–2024 menunjukkan perbaikan secara bertahap, namun tidak serta-merta menekan angka kriminalitas. Hal ini memperkuat argumen bahwa analisis kriminalitas tidak cukup hanya melihat pengangguran, tetapi juga

harus mempertimbangkan variabel lain seperti kemiskinan dan disparitas pendapatan, sebagaimana fokus penelitian ini.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan pada konteks nasional atau provinsi, sementara kajian spesifik pada Kota Medan masih terbatas, padahal Medan merupakan kota metropolitan terbesar di luar Pulau Jawa dengan karakteristik sosial-ekonomi yang unik laju urbanisasi tinggi, kemiskinan perkotaan, serta ketimpangan pendapatan yang semakin melebar.

Dengan demikian, gap penelitian ini terletak pada perlunya analisis lebih komprehensif mengenai pengaruh pengangguran, kemiskinan, dan disparitas pendapatan terhadap kriminalitas secara simultan pada konteks lokal Kota Medan. Penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut sekaligus memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi dinamika kriminalitas di wilayah perkotaan.

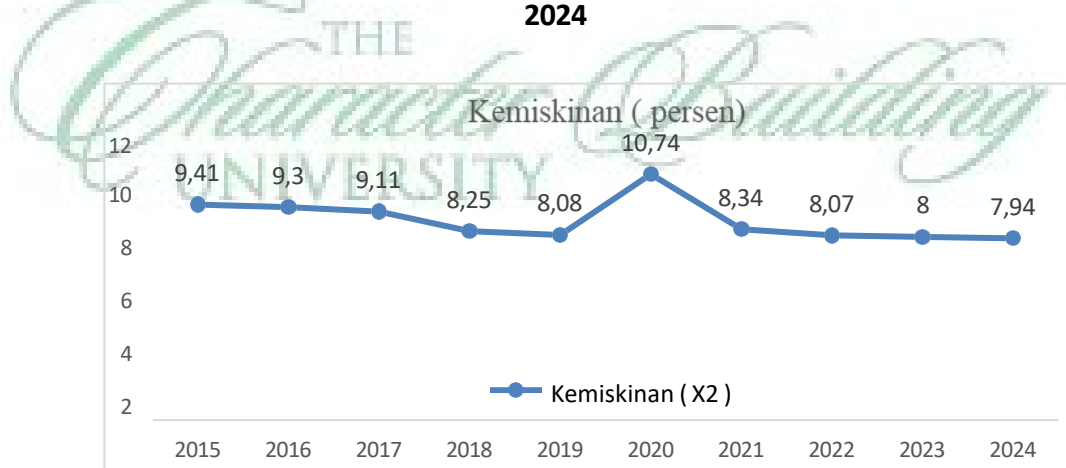
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenaga kerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak berkerja dan tidak memiliki pekerjaan namun sedang berada dalam tahap mencari atau mempersiapkan usaha baru. Badan Pusat Statistik juga menyatakan bahwa pengangguran merupakan penduduk yang tidak mencari pekerjaan sama sekali atau mereka tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima tetapi belum mulai berkerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi mencerminkan banyaknya penduduk yang tidak bekerja sama sekali dan tidak memiliki penghasilan. Hal ini menyebabkan jurang pemisah antara seseorang yang berpenghasilan dan

seseorang yang tidak berpenghasilan semakin dalam. Kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan pendapatan. Oleh sebab itu, Tingkat Pengangguran Terbuka harus diatasi sehingga ketimpangan pendapatan dapat berkurang (Fatsabit & Yupasran, 2019).

Berdasarkan Teori Disorganisasi Sosial (Shaw & McKay, 1942) menyatakan bahwa kemiskinan, kepadatan penduduk, dan lemahnya institusi sosial (keluarga, sekolah, masyarakat) akan meningkatkan peluang terjadinya kriminalitas. Selain pengangguran kemiskinan juga merupakan faktor penyebab terjadinya tindakan kriminalitas. kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan sosial yang hampir terjadi diseluruh negara yang sedang berkembang. Kemiskinan sendiri akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia, disebabkan karena mata rantai kemiskinan dapat memicu dan menyebabkan timbulnya masalah lainya, seperti, kelaparan, kebodohan, dan tindakan kriminalitas yakni pencurian, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya.

Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Medan Tahun 2015-2024



Sumber: (BPS Medan, 2025)

Pada gambar 1.3 Berdasarkan grafik di atas, tingkat kemiskinan di Kota Medan periode 2015–2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2015, angka kemiskinan masih berada di level 9,41 persen, kemudian berangsur menurun hingga mencapai titik terendah pada 2019 sebesar 8,08 persen. Penurunan ini tidak terlepas dari stabilitas ekonomi nasional serta berbagai program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan berbagai stimulus sosial yang mampu menjaga daya beli masyarakat miskin.

Namun, pada tahun 2020, angka kemiskinan melonjak drastis menjadi 10,74 persen, puncak tertinggi selama satu dekade terakhir. Hal ini erat kaitannya dengan pandemi Covid-19 yang melumpuhkan banyak sektor ekonomi, terutama sektor informal dan UMKM, sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK), turunnya daya beli, dan jatuhnya sebagian besar rumah tangga ke dalam kategori miskin baru.

2021 jumlah tingkat kemiskinan di Kota Medan begitu tinggi hingga mencapai 19,03, akan tetapi mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Meskipun begitu, jumlah penduduk miskin di Kota Medan masih jauh sangat besar dibandingkan dengan kota lain disekitarnya. Kemiskinan yang terjadi karena masih terdapat pengangguran yang belum memiliki pekerjaan dan tidak mendapatkan lapangan pekerjaan.

Setelah pandemi mereda, angka kemiskinan kembali menurun secara bertahap hingga mencapai 7,94 persen pada tahun 2024, yang merupakan angka terendah dalam 10 tahun terakhir. Akan tetapi, meskipun kemiskinan

menurun, angka kriminalitas justru meningkat tajam pada tahun 2024. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kriminalitas tidak hanya dipengaruhi oleh kemiskinan absolut, tetapi juga oleh faktor lain seperti ketidakmerataan distribusi pendapatan (disparitas) dan ketidakpuasan relatif (relative deprivation) di masyarakat perkotaan.

Fenomena yang tampak dari data adalah bahwa kemiskinan absolut menurun, tetapi kriminalitas meningkat di tahun-tahun terakhir. Hal ini konsisten dengan kondisi Indonesia, khususnya kota Medan, di mana urbanisasi, ketimpangan pendapatan, dan tekanan hidup perkotaan menciptakan kerentanan sosial baru. Dengan kata lain, kriminalitas lebih banyak dipengaruhi oleh kesenjangan sosial dan rasa ketidakadilan, bukan sekadar jumlah orang miskin.

Hal ini didukung oleh Teori Relative Deprivation yang di kemukakan oleh Runciman (1966) Menyatakan bahwa kriminalitas lebih dipengaruhi oleh perasaan ketidakadilan akibat membandingkan diri dengan kelompok yang lebih sejahtera. Hal ini sangat relevan dengan kondisi Medan, di mana meski angka kemiskinan menurun, kesenjangan sosial antarwarga kota tetap mendorong kriminalitas. Selain itu teori Cultural Deviance Miller (1958) Menjelaskan bahwa komunitas miskin kerap mengembangkan subkultur menyimpang yang menganggap perilaku kriminal sebagai cara wajar bertahan hidup. Fenomena ini terlihat di beberapa kawasan perkotaan padat di Medan, di mana tekanan ekonomi dan lingkungan sosial berkontribusi terhadap perilaku kriminalitas.

Penelitian sebelumnya Putra (2016) menjelaskan dalam penelitian nya kemiskinan berpengaruh positif terhadap kriminalitas di kota besar, terutama pencurian dan perampokan. Sedangkan Nasution (2019) menjelaskan Di Sumatera Utara, tingginya kemiskinan memperburuk kriminalitas ekonomi, khususnya kejahatan jalanan. Penelitian yang dilakukan Handoko (2021) Menunjukkan bahwa ketidakpuasan relatif (*relative deprivation*), meski angka kemiskinan absolut menurun, tetap memicu peningkatan kriminalitas di wilayah perkotaan.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gap pada penelitian sebagian besar penelitian terdahulu menyoroti hubungan antara kemiskinan absolut dan kriminalitas, namun belum banyak yang membahas bagaimana penurunan angka kemiskinan tetap disertai dengan kenaikan kriminalitas akibat disparitas pendapatan. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menggunakan level nasional atau provinsi, sehingga masih terdapat kesenjangan penelitian terkait kajian spesifik di konteks lokal Kota Medan, yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi berbeda dari kota lain (urbanisasi tinggi, ketimpangan ekonomi, dan kepadatan penduduk).

Maka selain dari pada pengangguran dan kemiskinan maka jumlah kriminalitas di pengaruhi oleh ketimpangan pendapatan hal ini sesuai dengan Teori Deprivasi Relatif yang di kemukakan oleh Samuel A. Stouffer pada tahun (1949) yang menjelaskan dalam konsep nya sering kali mengaitkan ketimpangan pendapatan dengan kriminalitas, bahwa individu atau kelompok merasa di rugikan bukan karena kondisi mereka yang secara obsolut miskin,

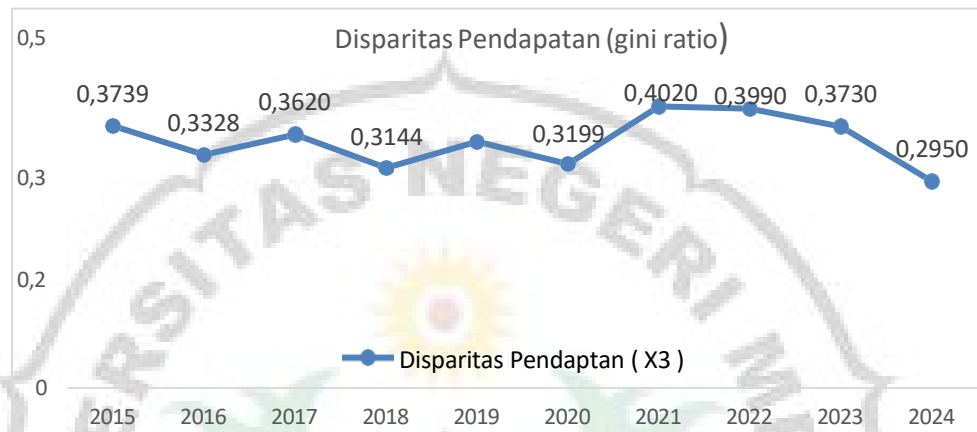
tetapi karena mereka merasa kekurangan atau tertinggal di bandingkan dengan kelompok lain yang memiliki lebih banyak sumber daya atau status sosial. Maka hal ini dapat memicu kecemburuan, ketidakpuasan dan rasa frustrasi, yang pada gilirannya bisa meningkatkan motivasi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Terutama yang berkaitan dengan properti seperti pencurian atau perampokan sebagai upaya untuk menyamakan kedudukan.

Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan bahwa teori deprivasi relatif menyoroti bahwa yang paling penting bukanlah seberapa miskin seseorang, akan tetapi seberapa miskin ia merasa dibandingkan dengan orang lain. Di kota dengan disparitas pendapatan yang tinggi, individu yang berada dilapisan bawah dapat melihat kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang dilapisan atas melalui media sosial, iklan atau bahkan kehidupan sehari-hari.

Adanya perbedaan sosial akan menciptakan perasaan ketidakadilan yang kuat. Kriminalitas kemudian merupakan bentuk respons terhadap ketidakadilan ini. Maka dari itu mengapa di beberapa daerah di kota medan meskipun angka kemiskinan absolut menurut namun, kriminalitas tetap naik hal ini dikarenakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar, memicu perasaan deprivasi yang lebih besar.

Berdasarkan hal ini maka grafik 1.4 dapat menjelaskan terkait ketimpangan pendapatan di kota medan, bisa dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1. 4 Gini Rasio Disparitas Pendapatan di Kota Medan 2015-2023



Sumber: (BPS Sumut, 2025)

Berdasarkan Gambar grafik 1.4 di atas, disparitas pendapatan di Kota Medan yang diukur dengan Gini Ratio menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2015–2024. Pada tahun 2015 disparitas mencapai angka 0,37, kemudian mengalami penurunan hingga 0,31 pada tahun 2018. Namun, setelah itu tren disparitas kembali meningkat secara tajam, bahkan mencapai titik tertinggi sebesar 0,40 pada tahun 2021 dan 2022. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Medan masih belum mampu didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah. Meskipun pada tahun 2024 disparitas menurun kembali menjadi 0,32, hal ini belum mencerminkan perbaikan yang konsisten karena tren sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan yang sulit ditekan dalam jangka panjang.

Tingginya disparitas ini erat kaitannya dengan ketimpangan pembangunan antara wilayah inti kota dengan kawasan pinggiran seperti Medan Utara, Belawan, dan Marelán yang relatif tertinggal dari segi infrastruktur, pendidikan, dan akses ekonomi.

Pada tahun 2015, Gini Ratio tercatat sebesar 0,3739, kemudian sempat menurun hingga 0,3144 pada tahun 2018 dan 0,3199 pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan sempat relatif menurun, sejalan dengan berbagai program pemerintah yang menargetkan pemerataan melalui bantuan sosial, peningkatan upah minimum, dan ekspansi lapangan kerja informal. Namun, pada tahun 2021, Gini Ratio meningkat signifikan hingga mencapai 0,4020, yang merupakan angka tertinggi selama periode pengamatan.

Kenaikan ini erat kaitannya dengan dampak pandemi Covid-19, di mana kelompok kaya mampu bertahan bahkan memperluas asetnya, sementara kelompok miskin semakin terpuruk akibat kehilangan pekerjaan dan berkurangnya pendapatan harian. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakmerataan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Setelah 2021, disparitas pendapatan cenderung menurun kembali dan mencapai 0,2950 pada tahun 2024, angka terendah selama satu dekade. Meskipun demikian, fenomena kriminalitas di Kota Medan justru meningkat pada periode yang sama. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kriminalitas tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan absolut, tetapi juga oleh ketidakpuasan relatif akibat kesenjangan sosial dan ketidakadilan distribusi pendapatan.

Hal ini sejalan dengan Teori Train yang dikemukakan oleh Merton (1938) Menjelaskan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat tidak memiliki akses terhadap cara-cara legal untuk mencapai tujuan hidup yang diakui (seperti kesejahteraan). Akibatnya,

sebagian individu memilih jalur kriminal sebagai alternatif. Selain itu Teori Relative Deprivation yang dikemukakan oleh (Runciman, 1966; Walker & Smith, 2002) Ketidakpuasan sosial muncul ketika individu merasa tertinggal dibanding kelompok lain. Ketimpangan pendapatan yang tinggi menumbuhkan rasa frustrasi kolektif, yang kemudian meningkatkan potensi tindakan kriminalitas.

Penelitian terdahulu yang mendukung yang dilakukan oleh Damayanti (2023) menegaskan bahwa disparitas pendapatan di Sumatera Utara, termasuk Medan, merupakan faktor signifikan yang memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi, karena distribusi hasil pembangunan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan. Dengan demikian, disparitas di Kota Medan tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga bertransformasi menjadi masalah sosial yang kompleks terhadap stabilitas pembangunan kota. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Fajnzylber, Lederman & Loayza (2002) dalam studi lintas negara menemukan bahwa ketimpangan pendapatan berhubungan erat dengan tingginya angka kejahatan kekerasan, Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2018) meneliti di Indonesia dan menyimpulkan bahwa disparitas pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kriminalitas, terutama kriminalitas jalanan.

Meskipun penelitian terdahulu seperti Fajnzylber, Lederman & Loayza (2002) dan Wijayanti (2018) telah menunjukkan hubungan kuat antara ketidaksetaraan pendapatan dan kriminalitas, studi-studi tersebut cenderung

bersifat makro. Fajnzylber et al. (2002) menggunakan data lintas negara, sementara Wijayanti (2018) menganalisis data pada skala nasional.

Meningkatnya disparitas pendapatan berarti jarak antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah semakin lebar. Ketimpangan ini menimbulkan rasa ketidakadilan sosial, kecemburuan sosial, serta tekanan psikologis bagi masyarakat miskin atau berpendapatan rendah. Dalam kondisi demikian, sebagian individu cenderung mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun meningkatkan taraf hidup, salah satunya melalui tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, begal, hingga tindak kekerasan.

Selain itu, terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas. Beberapa penelitian menemukan bahwa kemiskinan dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas, namun penelitian lain justru menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan atau bahkan negatif pada wilayah tertentu. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian, sehingga masih diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kriminalitas berdasarkan karakteristik daerah.

Kota Medan sebagai wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi dan aktivitas ekonomi yang padat memiliki peluang kejahatan yang lebih besar. Selain itu, meskipun indikator kemiskinan menurun, kelompok masyarakat rentan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan masih cukup besar

sehingga tekanan ekonomi tetap terjadi. Penurunan disparitas pendapatan juga belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan secara nyata, karena ketidakstabilan pekerjaan sektor informal, inflasi, serta dampak pasca pandemi dapat mendorong peningkatan tindakan kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalitas lebih dipengaruhi oleh kombinasi tekanan ekonomi, kesempatan kejahatan, serta dinamika sosial perkotaan.

Fenomena ini sesuai dengan teori Relative Deprivation yang menyatakan bahwa seseorang tidak hanya merasa miskin karena pendapatan rendah, tetapi karena ia membandingkan dirinya dengan kelompok lain yang lebih sejahtera. Ketika ketimpangan meningkat, rasa frustrasi sosial juga meningkat, sehingga mendorong perilaku menyimpang dan kriminalitas. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga sering memicu segregasi sosial, di mana kelompok kaya dan miskin hidup dalam kondisi yang sangat berbeda. Perbedaan ini meningkatkan potensi konflik sosial serta memperbesar peluang terjadinya kejahatan, terutama di wilayah perkotaan.

Hal ini terlihat kontradiktif karena pada saat yang sama indikator ekonomi makro seperti tingkat kemiskinan dan disparitas pendapatan (gini ratio) justru mengalami penurunan. Namun, kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa kriminalitas tidak hanya dipengaruhi oleh kemiskinan dan ketimpangan pendapatan semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor kesempatan kejahatan, tekanan sosial, mobilitas penduduk, serta perubahan pola ekonomi masyarakat.

Disparitas pendapatan dapat menurun bukan karena seluruh lapisan masyarakat mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan, tetapi dapat terjadi akibat pendapatan kelompok atas mengalami stagnasi atau penurunan sementara pendapatan kelompok bawah meningkat secara kecil. Dalam kondisi tersebut, masyarakat tetap merasakan ketimpangan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Hal ini mendukung pandangan bahwa ketimpangan tidak hanya berbentuk distribusi pendapatan, tetapi juga ketimpangan kesempatan (*inequality of opportunity*) yang dapat memicu frustrasi sosial dan berujung pada tindak kriminal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak merata dapat menciptakan ketidakstabilan sosial, sehingga meningkatkan potensi kejahatan di masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan mengangkat judul penelitian: **"ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN, KEMISKINAN, DAN DISPARITAS PENDAPATAN TERHADAP KRIMINALITAS DI KOTA MEDAN"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Masyarakat miskin cenderung memiliki pendapatan yang rendah, hal tersebut menyebabkan mereka mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, seseorang harus memiliki pekerjaan. Namun, dengan keterbatasan lapangan pekerjaan akan menimbulkan tingginya jumlah pengangguran sehingga tingkat kemiskinan dan tindak kriminalitas akan meningkat.
3. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS pada Kota Medan tingkat kemiskinan mengalami penurunan, akan tetapi masih sangat tinggi jumlahnya apabila dibandingkan dengan kota lain di satu provinsinya sehingga menjadi sebuah masalah karena melihat akan adanya faktor kriminalitas yang semakin meningkat.
4. Pada data yang diambil di BPS distribusi pendapatan di Kota Medan mengalami fluktuasi sehingga mengindikasikan adanya disparitas yang tinggi terhadap beban kerja dan pendapatan yang diterima masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Agar peneliti lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan pengaruh pengangguran, kemiskinan, dan disparitas pendapatan terhadap kriminalitas di Kota Medan dan hanya berfokus pada periode 2015-2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kriminalitas di Kota Medan?
2. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap kriminalitas di Kota Medan?
3. Apakah disparitas pendapatan berpengaruh terhadap kriminalitas di Kota Medan?
4. Apakah terdapat pengaruh secara bersamaan Pengangguran, Kemiskinan dan Disparitas Pendapatan terhadap tingkat kriminalitas di Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap kriminalitas di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap kriminalitas di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh disparitas pendapatan terhadap kriminalitas di Kota Medan.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara bersamaan Pengangguran, Kemiskinan, dan Disparitas pendapatan terhadap tingkat kriminalitas di Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menjadi penyumbang ilmiah dalam dunia pendidikan khususnya pada bidang studi ekonomi pembangunan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah kriminalitas di Kota Medan.

b. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya mengenai jumlah kriminalitas di Kota Medan.

c. Bagi Akademis

Dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Selain itu, dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai jumlah kriminalitas di kota lainnya.